



Sekda Yusran Teken PKS Sinergi Pemungutan Pajak Daerah

PENANDATANGANAN PKS SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH



ISTIMEWA.

PERJANJIAN - Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam menandatangani Perjanjian Kerja Sama Sinergi Pemungutan Pajak Daerah (Opsen) bersama Sekretaris Daerah se-Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (30/10).

KUBU RAYA, SP - Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam menandatangani Perjanjian Kerja Sama Sinergi Pemungutan Pajak Daerah (Opsen) bersama Sekretaris Daerah se-Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (30/10).

Penandatanganan dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Penandatanganan dilakukan serangkaian dengan pertemuan Capacity Building ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) se-Kalimantan Barat.

Adanya opsen pajak akan meningkatkan PAD Kubu Raya dan berkontribusi pada percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

"Kita targetkan untuk ke depannya PAD terus meningkat. InshaAllah di atas 200 miliar rupiah, kita upayakan semaksimal mungkin. Kalau bisa kita kejar kemandirian keuangan daerah sesuai dengan arahan pemerintah pusat juga," tuturnya.

"Ini merupakan satu pencerahan bagi kita, bagaimana sebagai daerah kabupaten juga bersama-sama men-support agregat untuk capaian pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa 7-8 persen sesuai arahan gubernur. IPM juga diharapkan meningkat terus," ucap Yusran Anizam.

Yusran mengungkapkan pertemuan dan penandatanganan perjanjian kerja sama guna percepatan penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sekaligus memperkuat sinergi pemungutan pajak.

Sementara Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson mengatakan penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan pemerintah kabupaten/kota merupakan bentuk sinergi di dalam upaya pemungutan pajak.

"Karena kita selama ini pajak bea balik nama dan pajak kendaraan bermotor dengan sistem bagi hasil 30 persen untuk pemerintah kabupaten dan kota serta 70 persen untuk provinsi," katanya.

Dengan kebijakan opsen, lanjut Harisson, maka terjadi perubahan persentase bagi hasil. Peningkatan pembagian pajak kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota yang semula hanya 30 persen menjadi 66 persen. (mar)